

## Integrasi Nilai Keislaman Sebagai Strategi Epistemologis Dalam Membentuk Berpikir Kritis Siswa di Era Post-Truth: Studi di SMA Muhammadiyah 1 Klaten

Shofia Fadila Nur Husna<sup>1</sup>, Muhammad Wildan Shohib<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*g000220158@student.ums.ac.id*<sup>1</sup>, *mws543@ums.ac.id*<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The post-truth era is characterized by the weakening authority of facts and the strengthening of emotional opinions. In this situation, Islamic education faces challenges not only in the moral domain, but also in the epistemological domain concerning how students distinguish truth from falsehood. This study aims to examine the integration of Islamic values focused on *sidq*, *tabayyun*, and *\*tafakkur* as an epistemological strategy in shaping students' critical thinking in senior high school using a qualitative method with a case study approach. This research was conducted at SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Data were collected through in-depth interviews with 2 teachers, 1 vice principal for curriculum, and 5 grade 12 students (selected based on students who had completed the entire series of Islamic Religious Education learning and possessed a more mature level of thinking), classroom observations, and critical-thinking task simulations. The results of this study demonstrate that Islamic values have not yet been explicitly utilized as tools for epistemological verification. This article offers a conceptual framework to bridge Islamic values and critical-thinking skills in the era of disinformation.*

**Keywords :** *Integration of Islamic values, Islamic epistemology, Critical thinking, Post-truth.*

### ABSTRAK

Era post-truth ditandai oleh melemahnya otoritas fakta dan penguatannya opini emosional. Dalam konteks ini, pendidikan Islam menghadapi tantangan tidak hanya pada ranah moral, tetapi juga pada ranah epistemologis tentang bagaimana siswa membedakan kebenaran dan kebatilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi nilai-nilai keislaman yang terfokus pada nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* sebagai strategi epistemologis dalam membentuk berpikir kritis siswa di SMA menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 2 guru, 1 wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta 5 siswa kelas 12 (pemilihan berdasarkan siswa yang sudah melalui rangkaian pembelajaran PAI secara lengkap dan memiliki tingkat berpikir yang lebih matang), observasi pembelajaran, dan simulasi tugas berpikir kritis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam belum difungsikan secara eksplisit sebagai alat verifikasi epistemologis. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual untuk menjembatani nilai-nilai Islam dan keterampilan berpikir kritis di era disinformasi.

**Kata kunci:** *Integrasi nilai Islam, Epistemologi Islam, Berpikir kritis, Post-truth.*

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah post-truth tidak lagi hanya menjadi kategori leksikal, melainkan telah menjelma menjadi kondisi sosial yang memengaruhi cara generasi muda mengakses, memahami, dan mempercayai

informasi. Kondisi ini ditandai oleh satu kecenderungan yang mengkhawatirkan, yaitu emosi dan keyakinan pribadi lebih dominan dalam membentuk opini daripada fakta objektif. Seperti yang dijelaskan McIntyre (2018), kata “post” di sini bukan berarti “setelah”, melainkan menandakan bahwa kebenaran objektif telah terpinggirkan atau bahkan sudah bisa dikatakan tidak relevan lagi. Istilah ini mirip dengan kata “truthiness” yang diperkenalkan Stephen Colbert pada 2005, yaitu “kebenaran yang dirasakan” meskipun tidak didukung fakta (Zimmer, 2010). Apa yang awalnya terdengar lucu kini telah menjadi masalah serius: masyarakat, termasuk para pendidik dan peserta didik, tidak lagi mudah membedakan mana fakta dan mana opini, mana berita benar dan mana hoaks.

Media sosial merupakan wadah pertama dengan algoritma yang mengukuhkan bias (echo chamber), menjadi saluran utama bagi penyebaran hoaks, disinformasi, dan narasi provokatif yang sering kali berbalut simbol-simbol keagamaan. Di Indonesia, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa dalam periode Oktober 2024 hingga Desember 2025 saja, terdapat 1.890 konten hoaks yang teridentifikasi (ANTARA, 2025). Lebih mengkhawatirkan lagi, puncak penyebaran hoaks terjadi pada bulan November 2024 dengan 166 konten, yang bertepatan dengan masa politik pasca-Pemilu atau isu nasional. Di tengah lautan disinformasi ini, siswa dan guru berada dalam posisi yang sama-sama rentan. Data nasional menunjukkan indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62% (kategori sedang) (Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center, 2024), yang berarti masyarakat luas, termasuk guru, belum sepenuhnya memiliki kemampuan memadai dalam menyaring dan memverifikasi informasi. Penelitian bahkan mengidentifikasi bahwa sebagian besar guru PAI masih menghadapi kendala dalam penguasaan teknologi dan rendahnya motivasi beradaptasi dengan perkembangan digital (Sukmawati et al., 2025).

Akar dari kerentanan ini tidak hanya terletak pada lemahnya literasi digital, tetapi juga pada pola pendidikan yang selama ini membentuk kebiasaan berpikir pasif. Di sinilah Paulo Freire menulis kritikan dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* bahwa penyebutan *banking model of education* adalah sebuah model di mana guru hanya sebagai “menyetor” pengetahuan ke dalam diri siswa yang diposisikan sebagai wadah kosong tanpa daya kritis (Freire et al., 2018). Dalam model ini, siswa tidak dilatih untuk mempertanyakan, memverifikasi, atau mencari kebenaran secara mandiri. Mereka hanya menjadi penampung pasif atas informasi yang diberikan. Ketika pola berpikir seperti ini dibawa ke era digital, hal ini menimbulkan dampak yang fatal, yaitu siswa atau bahkan guru menjadi terbiasa menerima informasi apa adanya tanpa proses verifikasi. Mereka tidak memiliki “kecurigaan yang sehat” terhadap klaim-klaim yang beredar (Freire et al., 2018). Dengan kata lain, model banking telah menciptakan budaya epistemologis yang pasif, dan era post-truth hanya memperparah kondisi tersebut karena informasi palsu kini datang dari berbagai arah (Freire et al., 2018).

SMA Muhammadiyah 1 Klaten dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang justru menarik untuk diuji. Di satu sisi, sekolah ini memiliki basis keislaman yang kuat dan diakui secara nasional (Data Sekolah, 2024), baru saja ditetapkan sebagai Sekolah Unggul Utama oleh Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2024 dengan akreditasi A, dan masuk dalam 59 sekolah level utama dari 474 sekolah Muhammadiyah se-Indonesia. Sekolah ini mengedepankan nilai religius, kedisiplinan, dan prestasi akademik, serta memiliki program unggulan seperti tahfidz Al-Qur'an dan kurikulum Ismuba (Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab) sebagai napas utama pendidikan karakter (SieradMU, 2024). Dari sisi akademik, sekolah ini juga menunjukkan kemajuan dengan 21 siswanya lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada tahun 2026, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya (SieradMU, 2026). Namun, di sisi lain, sejauh mana budaya berpikir kritis dan verifikasi informasi yang berbasis nilai-nilai Islam seperti *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* telah terinternalisasi di sekolah ini belum pernah diteliti secara sistematis.

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Al Farros dan Hafidz (2024) telah memberikan kontribusi penting dalam memahami peran PAI untuk pembentukan moral siswa di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Dengan pendekatan normatif, berhasil menunjukkan bahwa PAI berperan signifikan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran dan keadilan melalui metode diskusi dan keteladanan. Namun di sisi lain, pendekatan normatif semacam itu menyisakan sebuah “ruang kosong” yang krusial di era post-truth saat ini. Pendekatan belum menyentuh dimensi epistemologis, yaitu bagaimana nilai-nilai keislaman itu sendiri dapat berfungsi sebagai instrumen nalar. Dalam konteks derasnya hoaks dan informasi, siswa tidak cukup hanya diajari tentang nilai kejujuran secara umum, tetapi perlu dibekali dengan seperangkat alat berpikir seperti *sidq* (kebenaran faktual), *tabayyun* (verifikasi), dan *tafakkur* (penalaran reflektif) yang memungkinkan mereka secara aktif menilai dan memverifikasi klaim kebenaran (Alhayyani, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji integrasi nilai-nilai keislaman sebagai strategi epistemologis, sebuah fokus yang belum terjamah secara spesifik oleh penelitian Al Farros dan Hafidz maupun studi-studi lain di lingkungan sekolah yang sama.

Di tengah gelombang ini, pendidikan Islam tidak bisa lagi hanya bertumpu pada transfer pengetahuan agama yang bersifat normatif. Tantangan yang muncul bukanlah sekadar lemahnya hafalan ayat atau kurangnya pemahaman fiqh, melainkan krisis yang lebih fundamental, yaitu krisis cara mengetahui (*epistemic crisis*) (Hoggan-Kloubert & Hoggan, 2023). Siswa dan guru tidak hanya sulit membedakan mana berita yang benar dan salah, tetapi juga kehilangan kerangka berpikir yang sistematis untuk memverifikasi klaim tunggal, apakah itu klaim keagamaan yang ekstrem, narasi politik yang provokatif, atau sekadar informasi sehari-hari yang tidak jelas sumbernya. Dalam konteks inilah, sebagian besar literatur tentang pendidikan Islam di era post-truth masih berfokus pada penguatan

karakter, akhlak, atau ketahanan spiritual. Misalnya, penelitian-penelitian terdahulu banyak menyoroti pentingnya keteladanan guru, pembiasaan ibadah, dan internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab (Mahendra et al., n.d.). Namun, sangat sedikit yang membahas secara serius bagaimana nilai-nilai Islam itu sendiri dapat berfungsi sebagai instrumen epistemologis, yaitu sebagai alat untuk menilai, menguji, dan memilah kebenaran (Syarip et al., 2026). Dalam epistemologi Islam, kebenaran (al-haqq) tidak dipahami semata sebagai kategori moral, melainkan sebagai kategori kognitif yang menuntut proses verifikasi aktif (Al-Attas, 1995).

Tiga konsep berikut menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini (Al-Ghazali, 2016): (1) *sidq* didefinisikan secara operasional sebagai kesesuaian antara ucapan dan realitas objektif. Dalam penelitian ini, *sidq* diukur melalui sejauh mana siswa dan guru menuntut kesesuaian fakta sebelum menerima atau menyebarkan sebuah informasi. (2) *Tabayyun* didefinisikan sebagai proses verifikasi sistematis terhadap sumber, motif, dan validitas sebuah klaim sebelum mengambil keputusan atau sikap. Secara operasional, *tabayyun* diukur melalui perilaku pengecekan silang (*cross-checking*) yang dilakukan informan ketika dihadapkan pada informasi yang meragukan (Shihab, 2002). Dan (3) *tafakkur* didefinisikan sebagai penalaran reflektif yang melibatkan perenungan mendalam atas sesuatu fenomena sebelum sampai pada kesimpulan. Secara operasional, *tafakkur* diukur melalui kedalaman pertimbangan, bukan reaksi spontan yang ditunjukkan informan dalam menanggapi isu kontroversial. Ketiga nilai Islam tersebut secara langsung relevan dengan kebutuhan berpikir kritis di era digital (Badi, 2011).

Al-Attas mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab akan melahirkan kerusakan epistemologis. Itulah yang terjadi ketika orang-orang (termasuk pendidik) menyebarkan kebohongan dengan narasi yang meyakinkan tanpa melalui proses verifikasi (Al-Attas, 1995). Tanpa integrasi nilai-nilai Islam sebagai strategi epistemologis dalam pembelajaran, krisis ini akan terus berlangsung dan generasi muda Muslim akan semakin rentan terhadap disinformasi serta kehilangan kemampuan membedakan kebenaran dari kebatilan. Hal ini diperkuat dalam kerangka analisis yang mengacu pada hermeneutika kecurigaan Paul Ricoeur yang digunakan sebagai pisau analisis tambahan untuk membaca sejauh mana informan menaruh skeptisisme metodis dalam membaca informasi dengan mempertanyakan sumber, motif, dan kepentingan di balik setiap klaim sebagai bentuk kontekstualisasi *tabayyun* dalam praktik nyata (Ricoeur, 1970).

Sebagai pembanding sekaligus pelengkap epistemologi Islam di atas, penelitian ini menggunakan enam keterampilan berpikir kritis milik Facione yang mengidentifikasi enam keterampilan inti: (1) interpretasi, memahami makna suatu informasi; (2) analisis, mengidentifikasi hubungan antar-argumen; (3) evaluasi, menilai kredibilitas klaim atau sumber; (4) inferensi, menarik kesimpulan logis dari bukti yang ada; (5) eksplanasi, menjelaskan alasan di balik suatu penilaian; (6)

regulasi diri, memeriksa dan mengoreksi proses berpikir sendiri). Kedua kerangka ini akan digunakan untuk menganalisis kemampuan siswa dalam menilai informasi hoaks, sekaligus melengkapi fondasi epistemologis Islam yang telah diuraikan sebelumnya (Facione, 1990).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah sudut pandang baru, yaitu bahwa integrasi nilai keislaman tidak cukup hanya sebagai pendidikan moral, tetapi harus didudukkan sebagai strategi epistemologis untuk membentuk berpikir kritis siswa. Fokus penelitian ini bukanlah pada kegiatan keagamaan semata, melainkan pada bagaimana nilai-nilai seperti *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* diajarkan, dilatihkan, dan diinternalisasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari sehingga baik guru maupun siswa memiliki kemampuan untuk menilai informasi secara kritis berdasarkan kerangka kebenaran Islam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada satu pertanyaan utama:

Bagaimana integrasi nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* dalam pembelajaran di SMA dapat membentuk kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyikapi informasi hoaks di era post-truth?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini disusun dengan tujuan khusus sebagai berikut: (1) mendeskripsikan pemahaman guru PAI, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten terhadap nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* sebagai instrumen penilaian kebenaran informasi. (2) Mendeskripsikan bentuk dan proses integrasi nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* dalam praktik pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. (3) menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam memverifikasi informasi hoaks berbasis nilai-nilai Islam tersebut, melalui hasil simulasi tugas berpikir kritis. (4) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai keislaman sebagai strategi epistemologis di sekolah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif, yang dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena integrasi nilai-nilai keislaman sebagai strategi epistemologis dalam konteks spesifik di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026 selama 1 bulan 2 minggu. Informan dipilih secara purposif, meliputi 2 orang guru PAI (pengalaman mengajar minimal 5 tahun), 1 orang wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, dan 5 siswa kelas 12. Teknik pengumpulan data terdiri atas: (1) Wawancara mendalam (60-90 menit per informan) untuk menggali pemahaman guru dan siswa tentang *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* serta pengalaman mereka dalam menggunakan nilai-nilai tersebut untuk menilai informasi. (2) Simulasi tugas berpikir kritis: siswa diberikan dua buah artikel pendek, masing-masing artikel memiliki nilai, yaitu satu hoaks dan satu faktual, disesuaikan dengan isu yang beredar di media sosial bertema keagamaan. Siswa diminta menilai

kebenaran kedua artikel tersebut dengan menjelaskan alasan berdasarkan nilai Islam. Tugas ini tidak dinilai secara akademis, tetapi dianalisis sebagai data kualitatif.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014): kondensasi data (memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah), penyajian data (menyusun data dalam teks naratif), dan penarikan kesimpulan (menafsirkan makna dan memverifikasi dengan data). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu guru, siswa, dan dokumen, dengan teknik wawancara, observasi, dan tugas simulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA Muhammadiyah 1 Klaten merupakan sekolah yang secara struktural telah menempatkan penalaran kritis sebagai bagian resmi dari capaian lulusannya. Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sekolah ini mencantumkan “Penalaran Kritis” sebagai satu dari delapan Dimensi Profil Lulusan, dengan deskriptor bahwa lulusan diharapkan “mampu berpikir secara logis, analitis, dan evaluatif” serta “menemukan solusi yang tepat berdasarkan nalar yang sehat”. Urgensi penguatan dimensi ini sejalan dengan data skala nasional: hasil PISA 2022 mencatat bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam menjawab soal berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) berada jauh di bawah rata-rata internasional, sementara mayoritas siswa hanya mampu menjawab soal pada level berpikir tingkat rendah (OECD, 2023). Struktur kurikulum kelas 12 turut memuat materi berpikir kritis secara eksplisit sebagai bab pertama mata pelajaran Al-Qur’an, sebagaimana dikonfirmasi oleh Guru PAI 1: “Berpikir kritis itu adalah materi pertama yang kita pelajari ketika kita masuk kelas 12” (K. Azzahria, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa secara kebijakan, sekolah telah menyediakan payung formal bagi pengembangan nalar kritis. Namun demikian, sejauh mana nilai-nilai epistemologis Islam seperti *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* secara spesifik terintegrasi ke dalam payung tersebut, sebagaimana akan diuraikan berikut, ternyata jauh lebih bergantung pada inisiatif individual guru ketimbang mandat kurikulum yang terstruktur.

Pemahaman informasi terhadap *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* menunjukkan pola yang berbeda antara guru dan siswa. Guru PAI 1 memakai *sidq* terutama dalam dimensi moral-personal, tercermin dari kebiasaan menanyakan pelaksanaan salat Subuh setiap pagi sebagai sarana melatih kejujuran mengakui kesalahan: “Saya selalu menekankan, jujur itu nomer 1... itu bagian dari adab kita” (K. Azzahria, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Pemahaman seperti ini baru menyentuh epistemologis secara implisit ketika informan menyinggung risiko menyampaikan informasi yang belum pasti kebenarannya sebagai bentuk “dosa jariyah”. Guru PAI 2 memaknai *sidq* lebih ke arah integritas akademik (larangan plagiarisme tugas), juga belum eksplisit menasari verifikasi informasi publik. Sebaliknya, siswa justru menunjukkan artikulasi konseptual yang lebih eksplisit terhadap dimensi epistemik

sidq. MFA menyatakan kejujuran mencakup “menyampaikan benar atau belum” (MFA, komunikasi pribadi, 17 Juni 2026), Sementara MH (paling matang di antara informan siswa) menegaskan bahwa “tanpa adanya data yang pasti... menyampaikan sesuatu argumentasi yang belum diketahui kejelasannya...itu belum dipastikan sepenuhnya jujur” (MH, komunikasi pribadi, 17 Juni 2026). Pernyataan MH ini secara substantif memiliki bentuk definisi operasional sidq yang dirumuskan dalam kerangka penelitian ini. Pola ini mengidentifikasi sebuah temuan penting: internalisasi nilai epistemologi pada siswa tidak sepenuhnya merupakan hasil transmisi eksplisit dari guru, melainkan sebagian tampak sebagai hasil refleksi personal siswa itu sendiri saat dihadapkan pada pertanyaan langsung.

Pola serupa namun lebih tajam terlihat pada tabayyun. Secara struktural, konsep ini sesungguhnya sudah masuk sebagai materi resmi kelas 11, sebagaimana dikonfirmasi Guru PAI 1: “Itu masuk di materi kelas 11... jangan pernah kita menyampaikan sesuatu kalau itu belum tentu ada kebenarannya” (K. Azzahria, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Namun, ironisnya, ketika ditanya secara reflektif pada bagian simulasi, mayoritas siswa mengaku lupa maknanya: MFA menjawab “antara pernah atau lupa” (MFA, komunikasi pribadi, 17 Juni 2026), MH mengaku “sebenarnya udah pernah, tapi lupa artinya” (MH, komunikasi pribadi, n.d.), dan bahkan setelah simulasi berlangsung, MF/AZ menjawab “tidak/lupa” ketika ditanya ulang (Lembar Jawaban Simulasi Tugas Berpikir Kritis, n.d.). Fenomena ini menunjukkan adanya disosiasi antara istilah dan praktik perilaku: pada pertanyaan terpisah mengenai kebiasaan verifikasi informasi dari media sosial, hampir seluruh siswa justru melaporkan praktik *cross-checking* yang cukup konsisten. NCS menjelaskan mekanisme membandingkan beberapa sumber berita: “Kalau misalkan dari beberapa sumber ternyata ada data, tetapi itu beda-beda semua, kemungkinan besar dia salah” (NSC, komunikasi pribadi, 17 Juni 2026). Sementara MH menyebut kebiasaan riset di Google sebelum mempercayai informasi WhatsApp. Temuan disosiasi ini konsisten dengan trend riset tabayyun digital terkini di Indonesia, yang secara khusus menyoroti bahwa literasi digital berbasis tabayyun tidak terbangun hanya melalui pengenalan istilah semata, melainkan menuntut modul internalisasi kriteria di era disrupsi informasi saat ini, urgensi tabayyun bagi pelajar justru semakin mendesak karena renggangnya keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan praktik verifikasi aktual di kalangan generasi *digital native* (Ramdani, 2026); kondisi sejumlah peneliti turut dikaitkan dengan lemahnya pendekatan pendidikan Islam yang masih menempatkan literasi digital sebagai keterampilan teknis semata, alih-alih sebagai dari etika keilmuan yang harus dilatih berulang (Hasanah & Sukri, 2025). Dengan demikian, siswa pada dasarnya sudah melakukan perilaku yang secara substantif adalah tabayyun, tetapi tidak secara sadar mengaitkannya dengan label konseptual keislaman yang telah diajarkan. Hal itu, menimbulkan sebuah kesenjangan antara pengetahuan deklaratif (mengenai istilah) dan pengetahuan prosedural yang teraktivikasi tanpa kesadaran epistemik Islami yang eksplisit.

Nilai tafakkur tampak paling kuat diinternalisasi melalui pendekatan Guru PAI 1, yang secara konsisten melatih perenungan reflektif berbasis kasus kontekstual, misalnya, mengajak siswa membayangkan perspektif perilaku maupun korban dalam kasus kekerasan seksual sebagai sarana melatih empati sekaligus penalaran moral: “Coba kalau kalian menjadi seorang Bapak bagaimana?” (K. Azzahria, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Guru PAI 2 relatif tidak mengeksplisitkan latihan tafakkur serupa, kemungkinan terkait keterbatasan alokasi waktu mengajarnya yang hanya satu jam pertemuan untuk mata pelajaran non-inti. Pada level siswa, pemahaman keterkaitan ketiga nilai tersebut justru tampak cukup terintegrasi secara alami, seperti diungkapkan oleh NSC: “kalau sidq itu tadi kan kita kayak ngejelasin ini bener atau salah... tapi kan kita belum tahu nih... tanpa adanya pengecekan atau tabayyun... ketiga itu tadi, nilai tadi, berhubungan satu sama lain” (Lembar Jawaban Simulasi Tugas Berpikir Kritis, n.d.). Pernyataan ini menunjukkan bahwa meski istilah formalnya kabur, struktur kognitif siswa sesungguhnya telah menangkap logika siklus antara ketiga nilai: sidq sebagai tuntunan kesesuaian fakta (Sari et al., 2025), tabayyun sebagai mekanisme verifikasinya, dan tafakkur sebagai proses penalaran yang menjembatani keduanya.

Bentuk integrasi nilai-nilai tersebut dalam praktik pembelajaran menunjukkan variasi yang signifikan antar-guru, mengindikasikan bahwa integrasi ini belum terstandardisasi secara sistematis. Guru PAI 1 menerapkan struktur pembelajaran yang relatif kaya ruang reflektif — kombinasi pembiasaan spiritual (mengecek salat Subuh), tilawah bergilir, ceramah terbatas (maksimal satu jam dari tiga jam pembelajaran), dan sesi diskusi terbuka. Guru PAI 2 sebaliknya, mengonfirmasi pendekatannya lebih didominasi hafalan karena keterbatasan struktural: “Kalau saya sebenarnya seimbang. Karena ceramah, kenapa kok saya banyak ceramahnya? Karena saya menyampaikan bahasa asing... anak-anak itu belum semua itu lulus iqra’ saja” (N. Azizah, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Ketimpangan pendekatan ini turut dikonfirmasi secara konsisten oleh kelima siswa: MFA dan NP menyatakan mayoritas PAI adalah hafalan, “tapi ada yang berpikir kritis, cuma mayoritas menghafal”; AZ membedakan antara mata pelajaran Al-Qur’an Hadist yang “full hafalan” dengan Tarikh/Fikih yang lebih diskursif, NSC bahkan menyoroti adanya kesenjangan antara proses pembelajaran yang minim informasi dengan tuntutan ujian yang justru menuntut detail tinggi — sebuah gejala yang secara langsung merefleksikan kritik Freire terhadap *banking model of education*, di mana pengetahuan “disetorkan” tanpa proses pemahaman kritis yang memadai, dan evaluasi hanya menuntut reproduksi hafalan (N. Azizah, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026).

Pada level kebijakan, WAKA Kurikulum tidak sekalipun menyebut istilah sidq, tabayyun, atau tafakkur secara eksplisit sepanjang wawancara — informan lebih banyak berbicara dalam kerangka “8 Dimensi Profil Lulusan” secara umum dan penyerahan tanggung jawab operasional sepenuhnya kepada guru mata pelajaran: “Jadi setiap guru punya tanggung jawab sendiri-sendiri dari RPP mereka”

(Dina, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Pola ini mengonfirmasi bahwa integrasi nilai epistemologi Islam di sekolah ini pada dasarnya bersifat *bottom-up* dan bergantung pada inisiatif serta kapasitas pedagogis guru secara individual, bukan hasil dari kebijakan kurikuler yang secara eksplisit mengoperasionalkan konsep tersebut sebagai kerangka pembelajaran wajib (Putri & Shohib, 2024).

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam memverifikasi informasi hoaks, sebagaimana diukur melalui simulasi tugas, menghasilkan temuan yang paling signifikan dan sekaligus paling mengkhawatirkan dalam penelitian ini. Simulasi menyajikan dua artikel: Artikel 1 memuat klaim fiktif bahwa MUI mengeluarkan fatwa pembayaran fidyah via QRIS berdasarkan sebuah video dari platform TikTok viral seorang narasumber — pola khas disinformasi keagamaan (klaim sepihak tanpa adanya rujukan dokumen resmi, angka nominal spesifik, sumber tunggal berupa video media sosial dan deskripsi caption berita). Artikel 2 memuat klaim yang sesuai dengan fakta mengenai kebolehan membaca Al-Qur'an digital tanpa wudhu, dengan rujukan resmi ke Lembaga NU. Hasil penilaian menunjukkan pola mengejutkan: dari kelima siswa, hanya satu (AZ) yang berhasil mengidentifikasi artikel 1 sebagai tidak benar (dengan tingkat keyakinan tertinggi, 5/5); tiga siswa lainnya (MH, NSC, MF) justru menilai artikel 1 sebagai benar, dengan tingkat keyakinan tinggi (4-5 dari 5). Sebuah kegagalan deteksi hoaks yang signifikan mengingat seluruh siswa ini sebelumnya, dalam wawancara, menunjukkan pemahaman konseptual yang relatif baik mengenai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur*. Satu siswa (NP) memilih “tidak yakin” untuk kedua artikel dengan tingkat keyakinan yang rendah (3/5). Sebuah respons yang jika ditinjau dari perspektif logis, justru merupakan sikap paling tepat karena mencerminkan kehati-hatian menahan penilaian di tengah ketidakpastian informasi dengan tidak langsung percaya itu jauh lebih baik daripada langsung memvonis benar atau salah secara terburu-buru (Lembar Jawaban Simulasi Tugas Berpikir Kritis, n.d.).

Yang secara analitis lebih penting adalah alasan tertulis di balik penilaian yang keliru tersebut. MH, misalnya, menulis bahwa ia telah “memverifikasi terkait fidyah: apakah boleh disalurkan melalui QRIS... di Google? Ternyata boleh, asal jelas dan adil terpercaya” (Lembar Jawaban Simulasi Tugas Berpikir Kritis, n.d.). Pernyataan ini mengungkapkan sebuah keputusan yang tidak tepat dengan kategorisasi yang mendasar: verifikasi yang dilakukan siswa ditunjukkan pada kewajaran normatif dari praktik yang diklaim (apakah pembayaran fidyah digital secara fikih diperbolehkan); hal tersebut diambil bukan pada keaslian dan otoritas sumber klaim spesifik tersebut (apakah benar MUI mengeluarkan fatwa ini, apakah narasumber tersebut memang ada, mengapa pengumuman resmi disampaikan melalui video tiktok, bukan kanal resmi). NSC menunjukkan pola serupa: “Selama pembayaran/cara-caranya tetap dilakukan sesuai dengan syariat, maka dapat dilakukan” (Lembar Jawaban Simulasi Tugas Berpikir Kritis, n.d.). Dalam kerangka enam keterampilan Facione (1990), pola ini menunjukkan bahwa siswa mengaktifkan keterampilan interpretasi dan inferensi dengan baik (memahami

logika fikih di balik klaim, menarik kesimpulan tentang kebolehannya), namun keterampilan evaluasi untuk menilai kredibilitas dan keaslian sumber klaim itu sendiri nyaris tidak dipergunakan ataupun difungsikan. Dari sudut pandang hermeneutika kecurigaan Ricoeur (1970), tidak satu pun dari ketiga siswa yang keliru menunjukkan kecurigaan metodis terhadap kejanggalan struktural klaim tersebut (mengapa fatwa resmi lembaga negara disampaikan lewat video pendek viral, bukan dokumen resmi bernomor) menjadikannya sebuah kegagalan tabayyun pada tingkat yang paling mendasar: verifikasi otoritas dan motif di balik sumber. Kerentanan siswa terhadap artikel 1 ini perlu dibaca dalam konteks fenomena kontemporer yang lebih luas dan bukan semata kelalaian individual: penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa otoritas fatwa di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan di ruang digital, di mana fatwa tidak lagi didominasi lembaga resmi seperti MUI, melainkan turut diproduksi oleh figur non-institusional yang memperoleh pengakuan dari popularitas dan interaksi digital ketimbang dari proses institusional yang sah (Wibowo & Triadi, 2025); polemik seputar penerimaan publik terhadap fatwa-fatwa MUI di ruang digital turut menunjukkan bahwa otoritas keagamaan formal kini persaingan aktif dengan aktor-aktor keagamaan baru di media sosial (Gunawan et al., 2026). Dalam ekosistem informasi keagamaan yang otoritasnya sudah melemah semacam ini, kegagalan siswa mempertanyakan mengapa fatwa disampaikan melalui video viral alih-alih dokumen resmi bukan sekadar kelalaian pribadi, melainkan mencerminkan perubahan pola yang sangat besar, yakni bergesernya cara pandang publik terhadap siapa yang berhak bicara agama dan mengapa mereka dipercaya di dunia media sosial saat ini, sebuah kondisi yang justru menuntut penguatan tabayyun yang jauh lebih eksplisit dan sistematis daripada yang selama ini diajarkan secara implisit.

Temuan ini semakin diperkuat oleh refleksi diri siswa. Pada pertanyaan mengenai faktor yang paling mempengaruhi penilaian kebenaran berita, MH dan AZ, dua siswa dengan pola jawaban simulasi yang kontras (MH gagal, AZ berhasil), sama-sama mencentang “perasaan saya saat membaca (setuju/tidak setuju)” sebagai faktor dominan, bukan “saya cek sumber aslinya dulu” yang justru dipilih oleh NSC, MF, dan NP (Lembar Jawaban Simulasi Tugas Berpikir Kritis, n.d.). Faktor bahwa MH mengklaim telah melakukan verifikasi Google, namun secara reflektif mengakui bahwa perasaan personal-lah yang sesungguhnya paling berpengaruh, mengindikasikan adanya rasionalisasi pascafakta (*post-hoc rationalization*) — sebuah pola yang secara langsung mengonfirmasi diagnosis McIntyre (2018) tentang kondisi post-truth, di mana keyakinan emosional mendahului dan membentuk pembenaran rasional, bukan sebaliknya. Pola ini juga konsisten dengan temuan riset internasional bahwa berita bohong menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih dalam dibandingkan dengan berita benar, sebagian besar didorong oleh daya tarik *novelty* dan daya tarik emosional yang ditimbulkannya (Vosoughi et al., 2018); secara spesifik, emosi moral negatif seperti kemarahan terbukti mempercepat viralnya informasi tersebut dibandingkan dengan informasi yang

netral secara emosional (Solovev & Pröllochs, 2022). Lebih jauh, Effron dan Helgason (2022) menunjukkan bahwa dalam kondisi post-truth, individu cenderung memaafkan bahkan menormalisasi ketidakjujuran informasi selama hal itu dianggap menguntungkan kelompok atau sesuai dengan keyakinan yang telah dipegang sebelumnya. Sebuah pola yang berkaitan dengan temuan MH di atas. Sementara itu, Enroth (2023) menegaskan bahwa krisis post-truth pada dasarnya adalah krisis otoritas keilmuan: runtuhnya kesepakatan bersama tentang institusi mana yang berhak menjadi penjaga kebenaran, termasuk institusi keagamaan. Sebuah kerangka yang memperkuat pembacaan bahwa kegagalan tabayyun siswa dalam penelitian ini bukan semata-mata problem kognitif individual, melainkan gejala krisis otoritas keilmuan yang lebih luas.

Faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai keislaman sebagai strategi epistemologi di sekolah ini bersifat multidimensional. Pada aspek pendukung, teridentifikasi: (1) tersedianya kerangka kebijakan formal berupa Dimensi “penalaran kritis” dalam profil Lulusan; (2) materi berpikir kritis yang telah terjadwal secara eksplisit di kurikulum kelas 12; (3) sarana-prasarana pembelajaran yang memadai; serta (4) komitmen personal sebagian guru (khususnya Guru PAI 1) dalam merancang pembelajaran reflektif berbasis kasus kontekstual. Pada aspek penghambat, ditemukan sejumlah faktor struktural yang signifikan: pertama, pemangkasan alokasi jam PAI pasca-restrukturalisasi kurikulum Muhammadiyah yang menggabungkan mata pelajaran Al-Qur’an, Akidah, Fikih, dan SKI yang sebelumnya terpisah menjadi satu mata pelajaran tunggal, sehingga sebagian guru (Guru PAI 2) kini hanya memperoleh satu jam pertemuan per minggu untuk beberapa kelas (N. Azizah, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Kondisi yang menurut pengakuannya sendiri memaksa dominasi metode ceramah dan hafalan demi efisiensi waktu (N. Azizah, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Kedua ketidaksinkronan implementasi kebijakan *top-down*, sebagaimana dikeluhkan WAKA Kurikulum: sosialisasi program baru dari pemerintah kerap terlambat, padahal semestinya mendahului penyusunan KOSP dan RPP, “Ini malah kebalikannya, mbak, jadi ketegangan juga saya sebagai kurikulum” (Dina, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Ketiga, implementasi program Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) yang menjadi salah satu program prioritas sekolah yang semestinya menjadi wahana penguatan penalaran kritis, namun di sisi lain diakui belum berjalan secara optimal oleh WAKA: “Masih terbawa yang kemarin... jadi kurang menyasar” (Dina, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Keempat, heterogenitas siswa (kelas tahfidz, reguler, minat bakat khusus) yang menyulitkan penyeragaman pendekatan pembelajaran (Dina, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Kelima, ditemukan indikasi bahwa sebagian guru sendiri turut menjadi sumber informasi yang tidak terverifikasi kepada siswa tanpa proses tabayyun yang memadai, sebagaimana dikeluhkan oleh NSC mengenai pengalaman menerima informasi keliru dari guru yang “enggga dicari dulu, enggak dicek lagi lebih lanjut” sebelum disampaikan ke siswa (NSC, komunikasi pribadi, 2 Juli 2026). Sebuah temuan yang menegaskan

bahwa problem epistemologi di sekolah ini tidak semata-mata pada level siswa, melainkan turut melibatkan keteladanan dan tabayyun oleh pendidik itu sendiri.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperluas sekaligus mengkritisi hasil penelitian Al Farros dan Hafidz (2024) yang sebelumnya menegaskan keberhasilan PAI di sekolah ini dalam menanamkan nilai akhlak normatif. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penanaman nilai moral memang berjalan baik pada level kebiasaan personal (kejujuran perilaku, integritas akademik), namun “ruang kosong” epistemologi yang diidentifikasi dalam Pendahuluan penelitian ini terbukti nyata: nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* belum difungsikan secara eksplisit dan sistematis sebagai instrumen verifikasi terhadap arus informasi digital, melainkan masih beroperasi secara implisit, personal-tergantung-guru, dan rentan mengalami disosiasi antara pemahaman konseptual dengan performa aplikatif ketika benar-benar diuji melalui simulasi nyata. Temuan bahwa mayoritas siswa gagal mendeteksi hoaks keagamaan meskipun mengklaim telah melakukan “verifikasi” memberikan kontribusi teoritis penting bagi kajian epistemologi Islam kontemporer (Fatimah & Shohib, 2023): konsep *tabayyun* tidak boleh direduksi menjadi sekadar “kebiasaan mengecek”, melainkan harus dioperasionalkan dengan kriteria eksplisit yang menyorot otoritas dan motif sumber (sejalan dengan hermeneutika kecurigaan Ricoeur dan temuan terkini mengenai hancurnya otoritas fatwa digital), bukan semata-mata kewajaran isi klaim. Implikasi praktisnya, sekolah perlu mengembangkan modul *tabayyun* digital yang eksplisit dengan indikator konkret seperti pengecekan keberadaan dokumen resmi, verifikasi identitas narasumber, dan kewaspadaan terhadap pola penyebaran klaim keagamaan melalui saluran informasi (video viral). Jika selama ini kita mengandalkan penanaman nilai secara umum, penelitian ini justru mengungkapkan bahwa hal itu tidak serta-merta menciptakan kemampuan verifikasi yang efektif di praktik nyata. Hal ini sejalan dengan peringatan Al-Attas (1995) bahwa ilmu tanpa adab (tanpa metode verifikasi yang tegas) akan melahirkan kerusakan epistemologi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemahaman para informan mengenai nilai-nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* menunjukkan pola yang berbeda antara guru dan siswa. Sebagian besar guru PAI memahami ketiga nilai tersebut sebagai etika moral pribadi dan integritas akademik, sedangkan siswa, di sisi lain, menunjukkan artikulasi konseptual yang lebih eksplisit mengenai dimensi epistemologisnya, terutama terkait nilai *sidq*. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai epistemologis di kalangan siswa tidak sepenuhnya merupakan hasil dari transmisi eksplisit dari guru, melainkan

sebagian merupakan hasil refleksi pribadi siswa ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan reflektif.

Kedua, bentuk dan proses pengintegrasian nilai-nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* ke dalam pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Klaten bersifat *bottom-up* dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing guru; hal ini bukanlah hasil dari kebijakan kurikulum yang terstruktur. Guru PAI 1 menerapkan pendekatan yang memberikan ruang refleksi yang relatif luas, dengan memadukan praktik spiritual, pembacaan Al-Qur'an, ceramah singkat, dan diskusi terbuka. Sebaliknya, Guru PAI 2 lebih mengandalkan ceramah dan menghafal karena keterbatasan waktu dan kondisi awal para siswa. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum tidak secara eksplisit menyebutkan ketiga nilai tersebut dalam wawancara, melainkan hanya merujuk pada "8 Dimensi Profil Lulusan" secara umum.

Ketiga, kemampuan berpikir kritis siswa dalam memverifikasi informasi hoaks, sebagaimana diukur melalui tugas simulasi, masih rendah. Dari lima siswa, hanya satu yang berhasil mengidentifikasi artikel hoaks tersebut, sementara empat lainnya justru menilai artikel hoaks tersebut sebagai benar dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan kognitif dasar, melainkan oleh kesalahan dalam kriteria verifikasi: para siswa memverifikasi penerimaan normatif terhadap isi klaim tersebut (apakah hal itu diizinkan menurut hukum Islam), alih-alih keaslian otoritas dan motif sumbernya (apakah MUI benar-benar telah mengeluarkan fatwa tersebut, dan mengapa fatwa itu disampaikan melalui video viral). Dalam kerangka kerja Facione, siswa secara efektif menggunakan keterampilan interpretasi dan inferensi mereka, tetapi gagal dalam keterampilan evaluasi. Dalam kerangka kerja hermeneutika kecurigaan Ricoeur, tidak ada satu pun siswa yang menunjukkan skeptisisme metodologis terkait inkonsistensi struktural dalam klaim tersebut.

Keempat, faktor-faktor yang mendukung internalisasi nilai-nilai Islam sebagai strategi epistemologis di sekolah ini meliputi: (1) adanya kerangka kebijakan formal berupa dimensi "Pemikiran Kritis" dalam Profil Lulusan; (2) konten pemikiran kritis yang secara eksplisit dimasukkan ke dalam kurikulum kelas XII; (3) fasilitas dan infrastruktur pembelajaran yang memadai; serta (4) komitmen pribadi sebagian guru dalam merancang pengalaman belajar yang reflektif. Sementara itu, faktor-faktor penghambat meliputi: (1) pengurangan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) setelah restrukturisasi kurikulum; (2) kurangnya sinkronisasi dalam implementasi kebijakan *top-down*; (3) implementasi program *Deep Learning* yang belum optimal; (4) heterogenitas siswa; dan (5) indikasi bahwa beberapa guru sendiri menjadi sumber informasi yang belum terverifikasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam sebagai strategi epistemologi di SMA Muhammadiyah 1 Klaten masih berada pada tahap awal dan belum disusun secara sistematis. Nilai-nilai *sidq*, *tabayyun*, dan *tafakkur* belum secara eksplisit dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memverifikasi aliran informasi digital; sebaliknya, nilai-nilai tersebut masih berlaku

secara implisit, bergantung pada guru, dan rentan terhadap ketidaksesuaian antara pemahaman konseptual dan penerapan praktis ketika benar-benar diuji melalui simulasi dunia nyata. Temuan ini memperkuat peringatan Al-Attas bahwa pengetahuan tanpa adab (tanpa metode verifikasi yang ketat) akan menyebabkan kerusakan epistemologis, sekaligus mengkritik pendekatan pendidikan moral yang telah lama diandalkan tanpa dilengkapi dengan pelatihan verifikasi informasi yang eksplisit dan terstruktur di era pascakebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- al Farros, M. M. F., & Hafidz. (2024). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Siswa di SMA Muhammadiyah 1 Klaten*. 7(1).  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.949>
- Al-Attas, M. Naguib. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islām : an exposition of the fundamental elements of the worldview of Islām*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Ghazali, A. A.-Q. (2016). *The Just Balance ( Al-mustaqim Al-Qistas)* (D. Brewster, Trans.). Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Alhayyani, M. (2024). Al-Ghazali on Taqlid, Ijtihad, and Forming Beliefs. *Conatus*, 9(2), 9–22. <https://doi.org/10.12681/cjp.36321>
- Ami, L. A. P., Samad, D., & st. Mamad, F. (2025). INCLUSIVE EPISTEMOLOGY: A SYNTHESIS OF AL-GHAZALI AND FAZLUR RAHMAN FOR A MODERN ISLAMIC CURRICULUM. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 29(2), 151–158.  
<https://doi.org/10.37108/tabuah.v29i2.2442>
- ANTARA. (2025, December 8). *Kemkomdigi identifikasi 1.890 konten hoaks dalam satu tahun terakhir*. ANTARA News.
- Badi, J. (2011). "Thinking" terminologies from Quronic perspective and their impact on human intellectual development. *International Journal of Arab Culture, Management and Sustainable Development*, 2(1), 41.  
<https://doi.org/10.1504/IJACMSD.2011.044895>
- Data Sekolah. (2024). *SMAS MUHAMMADIYAH 1 KLATEN*.
- Domonell, M., Hurtado, M., & Daniela, M. (2021). Entre la verdad y la mentira: Releyendo a Freire para desenmascarar el mundo hoy. In *Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos International Journal of Studies in Educational Systems* (Vol. 3).
- E, S. (2025). Quranic Epistemology and Knowledge Construction: Medieval Models. *Advanced International Journal for Research*, 6(6).  
<https://doi.org/10.63363/aijfr.2025.v06i06.2273>
- Effron, D. A., & Helgason, B. A. (2022). The moral psychology of misinformation: Why we excuse dishonesty in a post-truth world. *Current Opinion in Psychology*, 47, 101375. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101375>

- Enroth, H. (2023). Crisis of Authority: The Truth of Post-Truth. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 36(2), 179–195. <https://doi.org/10.1007/s10767-021-09415-6>
- Facione, P. A. (1990). "The Delphi Report" *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction*. [www.insightassessment.com](http://www.insightassessment.com)650-697-5628
- Facione, P. A. (2015). *Permission to Reprint for Non-Commercial Uses Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. Peter A. Facione, Measured Reasons LLC.
- Fatimah, L. N., & Shohib, M. W. (2023). Problematika dan tantangan pendidikan Islam dalam kajian kontemporer. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3), 362-366.
- Freire, Paulo., Ramos, M. Bergman., Macedo, D. P. ., & Shor, Ira. (2018). *Pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury Academic.
- Gunawan, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2026). Kontestasi Otoritas Fatwa di Era Digital: Analisis Polemik Fatwa MUI Tentang Media Sosial. *EL-QANUNIY*, 12. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2719>
- Hilhamsyah, Hartanto, D., Saputra, W. N. E., Alfianti, N., Hanipah, M., & Alimah, S. R. (2025). Transformation of Religious Moderation Values through Digital Practices in the Character Building of Generation Z Teacher Candidates. *Journal of Pedagogy and Education Science*, 4(03), 626–640. <https://doi.org/10.56741/IISTR.jpes.001120>
- Hoggan-Kloubert, T., & Hoggan, C. (2023). Post-Truth as an Epistemic Crisis: The Need for Rationality, Autonomy, and Pluralism. *Adult Education Quarterly*, 73(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/07417136221080424>
- Hulmi, Z. A., & Apriadi, E. A. (2025). Analysis of the Effect of Using Artificial Intelligence on Critical Thinking Power of Students in the Digital Age. *International Journal of Technology and Computer Science*, 1(1), 38–50. <https://doi.org/10.58290/ijtc.v1i1.107>
- Imam Hanafi, & Hanifatur Rizqi. (2022). Al-Ghazali's Educational thought Model (Islamic Educational Philosophical Approach). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1435–1446. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i7.1762>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. (2024). *Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2024*. Jakarta: Kominfo.
- Mahendra, H., Roza, E., & Dewi, E. (n.d.). *EL-DARISA: Jurnal Pendidikan Islam KONSEP PENDIDIKAN ISLAM ABUDDIN NATA*. Retrieved <http://ejournal.staihwaduri.ac.id/index.php/eldarisa/>
- McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11483.001.0001>
- McIntyre, L. C. . (2018). *Post-truth*. The MIT Press.

- Nalus, S., Candra, O., Suanti, L., Rahmat, R., & Yahaya, M. B. (2024). Islamic Education in the Digital Era: Integrating Faith, Knowledge, and 21st-Century Skills. *Al-Ta Lim Journal*, 31(2). <https://doi.org/10.15548/jt.v31i2.1095>
- Nurfazri, M., Irwansyah, F. S., Lukman, F., Ruhullah, M. E., & Marinda, S. M. (2024). Digital Literacy in Education: An Analysis of Critical Thinking Culture for Preventing the Hoaxes. *Jurnal Perspektif*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.268>
- Paula, L. T. de. (2025). The Fake News Observatory: a teaching resource to cultivate an informed civic culture in Brazil. *Revue Internationale d'éducation de Sèvres, HS-4*. <https://doi.org/10.4000/146wl>
- PISA 2022 Results (Volume I). (2023). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Putri, A. R. I., & Shohib, M. W. (2025). Kompetensi Profesional Guru PAI dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), 244–255. <https://doi.org/10.54069/attadrib.v7i2.872>
- Ricoeur, P. (1970). *Freud and philosophy: An essay on interpretation* (Denis Savage, Trans.). Yale University Press.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- SieradMU. (2024). *Keren! SMA Muhammadiyah 1 Klaten Terpilih Sebagai Sekolah Unggulan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah*.
- SieradMU. (2026, April 2). *Kualitas Pendidikan Makin Bermutu, Puluhan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten Lolos SNBP 2026*. SieradMU.Com. <https://Sieradmu.Com>.
- Solovev, K., & Pröllochs, N. (2022). Moral Emotions Shape the Virality of COVID-19 Misinformation on Social Media. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022*, 3706–3717. <https://doi.org/10.1145/3485447.3512266>
- Sukmawati, A., Alviatin, A. K., & Mubarok, A. H. (2025a). Kesiapan Guru PAI Dalam Memanfaatkan ICT: Analisis Kompetensi, Tantangan dan Strategi Solutif di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(3), 2858–2868. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i3.3545>
- Sukmawati, A., Alviatin, A. K., & Mubarok, A. H. (2025b). Kesiapan Guru PAI Dalam Memanfaatkan ICT: Analisis Kompetensi, Tantangan dan Strategi Solutif di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(3), 2858–2868. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i3.3545>
- Syarip, S., Zuhdiyah, Z., & Maryamah, M. (2026). Epistemological Foundations of Science and Technology in Islam: A Literature Review. *Academia Open*, 11(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13128>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 8 (2026) 1356 – 1372 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i8.13181

- Wright, R. R. (2023). The way forward: Adult educators combating mis/disinformation via formal and informal education. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2023(178), 119–130. <https://doi.org/10.1002/ace.20491>
- Yuli, E., Sari, P., Shohib, M. W., & Anshori, A. (n.d.). *The Validity of Authentic Islamic Value-Based Assessment Instruments in Contemporary PAI Education: A Conceptual Analysis*.
- Zimmer, B. (2010, October 13). Truthiness. *The New York Times Magazine*.